



West and the Metanarrative of Terrorism: A Genealogical Analysis and the Absurdity of the U.S. Terrorism Narrative in the Middle East

Mas'odi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwanyar Pamekasan, Indonesia
masodi@staiduba.ac.id

Abstract

Keywords: West, Terrorism, and Middle East

This research will examine the Western world's metanarrative regarding the issue of terrorism and its impact on the Eastern world, especially the Middle East region. Terrorism is a complex issue and often becomes absurd when used as a political narrative by the ruling elites of the Western world. The West often enters the arena of war in the Middle East and carries out proxy wars against other opposing powers. The West, especially the US, often blurs the facts about who the perpetrators and victims of terrorism are. This research uses qualitative research methods to describe the phenomenon and discourse of terrorism developing in the Middle East. This research uses Pierre Boudieu's theory of genetic structuralism as an analytical tool. From this research, it was found that there was injustice in the West, especially the US, in using the narrative of terrorism. The US also uses violent methods to carry out counter-terrorism, which only gives rise to new terrorists emerging.

Abstrak

Kata Kunci: Barat, Terorisme, dan Timur Tengah

Penelitian ini akan mengkaji metanarasi dunia Barat tentang isu terorisme dan dampaknya terhadap dunia Timur, khususnya kawasan Timur Tengah. Terorisme merupakan isu yang kompleks dan sering menjadi absurd ketika digunakan sebagai narasi politik oleh para elit penguasa dunia Barat. Barat kerap masuk dalam gelanggang perang di Timur Tengah dan melakukan perang proxy melawan kekuatan lain yang berseberangan. Barat khususnya AS kerap mengaburkan fakta antara siapa pelaku dan korban terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendiskripsikan fenomena dan wacana terorisme yang

berkembang di Timur Tengah. Penelitian ini menggunakan teori strukturalisme genetik Pierre Boudieu sebagai pisau analisis. Dari penelitian ini ditemukan adanya ketidakadilan Barat khususnya AS dalam menggunakan narasi terorisme. AS juga menggunakan cara kekerasan untuk melakukan *counter-terrorism*, yang hal itu hanya melahirkan teroris-teroris baru bermunculan

Received: 03-07-2024, Revised: 19-09-2024, Accepted: 29-09-2024

© Mas'odi

Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang patut dikutuk bersama-sama. Terlepas siapa pelakunya dan apa modusnya, kejahatan ini sudah semestinya diakhiri sehingga tidak ada korban nyawa yang hilang sia-sia. Peristiwa 9/11 menjadi salah satu contoh nyata betapa mengerikan dampak yang ditimbulkan akibat aksi terorisme. Betapa tidak, hanya dalam hitungan menit, gedung kembar WTC di New York dan salah satu bangunan penting Departemen Pertahanan AS (Pentagon) di Washington DC, hancur total akibat ditabrak pesawat terbang. Sulit dipastikan, berapa nyawa yang sebenarnya menjadi korban tragedi ini (Sihbudi, 2007, p. 171).

Pencegahan kasus terorisme tidaklah mudah karena berkaitan dengan suatu keyakinan, baik keyakinan agama ataupun ideologi. Aktornya bisa saja ditangkap, dihakimi, bahkan dihilangkan, tetapi tidak dengan keyakinan yang mengendap di dalam diri setiap pelaku kekerasan tersebut.

Selain itu, kesulitan lain juga datang dari struktur wacana terorisme itu sendiri. Terorisme merupakan salah satu persoalan yang cukup kompleks. Hingga dewasa ini, diskursus tentang term terorisme terus berkembang dan belum ada kesepakatan utuh tentang definisinya. Definisi terorisme selalu dinamis dan berubah sesuai pergeseran ruang dan waktu. Sebagaimana dijelaskan Brian Michael Jenkins, bahwa perjalanan terorisme selama beberapa dekade mendatang tidak dapat diprediksi, sama seperti evolusi terorisme yang

sebenarnya selama 30 tahun terakhir mungkin tidak dapat diprediksi (Jenkins, 2006b). Oleh sebab itu, term terorisme tidak sepenuhnya bebas nilai.

Kendati demikian, sudah banyak tokoh, para pakar, akademisi, dan juga badan-badan dalam suatu negara (khususnya Barat) mengemukakan pendapatnya mengenai terorisme. Walter Reich dalam Whittaker (2003) menyatakan, bahwa terorisme adalah *a strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in the public at large* (suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum) (Hendropriyono, 2009, pp. 25-26; Whittaker, 2003). Sedangkan menurut Jenkins, terorisme adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan, yang bertujuan untuk mencapai terjadinya perubahan politik (Hendropriyono, 2009, p. 26; Jenkins, 1974, 1999, 2006a). Sementara Paul Johnson berpendapat, terorisme adalah suatu kejahatan politik, yang dari segi apa pun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan (Hendropriyono, 2009, p. 26; Johnson, 2008).

Beberapa negara Barat juga menuangkan pandangannya tentang terorisme secara resmi dalam undang-undang negaranya (Hendropriyono, 2009). Undang-undang tersebut yang kemudian menjadi payung hukum dalam menjalankan kebijakan terkait persoalan terorisme, khususnya tentang kontraterorisme.

Amerika Serikat, misalnya, mempunyai perspektif sendiri mengenai terorisme sebagaimana tertuang dalam Title 22 dari *United State Code, Section 2656f (d)*, yang mana rumusannya sebagai berikut: (1). Istilah terorisme berarti aksi kekerasan bermotivasi politik yang direncanakan sebelumnya, yang dilakukan terhadap sasaran nontempur (*noncombatant*) oleh agen-agen rahasia atau subnasional, yang biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi kalangan tertentu; (2). Istilah 'terorisme internasional' berarti terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negeri; (3). Sebutan 'kelompok teroris' berarti setiap kelompok yang mempraktikkan terorisme internasional. Definisi

inilah yang banyak menuai kritikan, sebab melalui definisi ini sering sekali pemerintah AS memojokkan negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah AS.¹

Sedangkan Inggris secara khusus mendefinisikan terorisme dalam *Terrorism Act 2000*, sebagai sebuah ancaman. Lebih spesifiknya definisi terorisme yang dimaksud Inggris ialah sebagai berikut:

Terorisme merupakan ancaman yang dirancang untuk mempengaruhi pemerintah atau menakut-nakuti masyarakat umum atau kelompok masyarakat... dan penggunaan ancaman dilakukan untuk kepentingan pengembangan sesuatu kepentingan yang bersifat politik, agama atau ideologi... yang melibatkan kekerasan secara nyata (serius) terhadap manusia, melibatkan perbuatan yang nyata merusak harta benda, membahayakan kehidupan manusia selain dirinya sendiri... menimbulkan suatu akibat nyata terhadap kesehatan atau keamanan masyarakat umum atau kelompok masyarakat atau dirancang secara nyata untuk mengganggu secara nyata sehingga merusak suatu sistem elektronika (Hendropriyono, 2009, pp. 30–31).

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memberikan pengertian tentang terorisme sebagaimana tertera dalam *Art. 1 of the Framework on Combating Terrorism (2002)*. Di sini menyatakan bahwa terorisme merupakan,

....tindak kriminal tertentu sebagaimana terdapat dalam suatu daftar yang memuat sebagian besar dari kejahatan-kejahatan terhadap manusia dan harta benda yang; “memberikan keadaan atau suasana kerusakan nyata (serius) terhadap suatu organisasi internasional untuk mencapai: ketakutan nyata di kalangan penduduk; atau menarik secara paksa perhatian dari sebuah pemerintahan atau organisasi internasional agar melakukan sesuatu langkah atau agar tidak melakukan langkah apa-apa; atau menimbulkan distabilitas yang nyata atau merusak basis politik, konstitusi, ekonomi atau struktur-struktur sosial dari suatu negara atau suatu organisasi internasional... (Hendropriyono, 2009, p. 30).

¹ Departemen Luar Negeri AS setiap tahun mengeluarkan semacam laporan tentang terorisme, yang berisi nama kelompok yang dianggap melakukan aksi teroris, serta negara yang dianggap mendukung dan menseponsori terorisme. Laporan Deplu AS tertanggal april 1993, berjudul ‘Patterns of Global Terrorism 1992,’ memasukkan Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, Suriah ke dalam ‘daftar negara pensponsor terorisme’. Kemudian pada tahun 2002 terdapat laporan dokumen yang bernama ‘Nuclear Posture Review’ yang merupakan rekomendasi Pentagon sebagai 7 Negara musuh AS, yakni China, Rusia, Iran, Irak, Libya, Suriah dan Korea Utara; sebelumnya Bush menyebut Iran, Irak dan Korea Utara sebagai ‘Poros Setan’. Lihat., (Prasetyo, 2002, pp. 60–61)

Mayoritas definisi terorisme yang tertuang di atas bertumpu pada satu konsep, yaitu kekerasan yang memberikan efek ketakutan dan jatuhnya korban. Jika demikian bunyinya, rasanya kita juga tidak boleh abai dengan peristiwa kekerasan yang juga melibatkan elemen-elemen negara ketika menjalankan tugas menyebabkan ketakutan dan bahkan menjatuhkan korban, seperti militer. Atau, jika terorisme selalu dikaitkan dengan aksi kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban nyawa dari kalangan sipil yang tidak bersalah, maka kondisi yang sama juga terlihat dalam suatu peperangan yang menggunakan senjata berat, di mana dalam peristiwa tersebut tidak jarang menyebabkan jatuhnya korban sipil yang tidak bersalah. Kalau demikian adanya, maka siapa yang sebenarnya patut disebut teroris atau peristiwa kekerasan seperti apa yang masuk kategori aksi terorisme?

Nyatanya, memang tidak mudah untuk memberi jawaban yang pas, *ajeg*, dan bebas nilai atas pertanyaan tersebut. Hal ini disebabkan definisi terorisme sendiri masih problematik dan belum ada kesepakatan bersama mengenai istilah tersebut. Bahasa dalam terorisme adalah bahasa universal, yang penilaian terhadapnya juga bersifat universal (Hendropriyono, 2009, p. 38).

Pada dasarnya, terorisme merupakan kosa kata yang artinya sulit didefinisikan secara lebih adil (Prasetyo, 2002, p. 59). Berbagai muatan kepentingan, baik politik, ideologi, ataupun lainnya, bisa saja mempengaruhi ketika mendefinisikan istilah tersebut. Fakta ini yang kemudian juga direspon oleh Bowyer Bell, dan secara gamblang dia ungkap dalam tulisannya, yaitu:

Faktanya, respons publik dan akademisi terhadap terorisme telah bersifat ahistoris, dibesar-besarkan, dan terkait erat dengan postur politik yang menyenangkan. Tidak ada konsensus tentang batasan terorisme: beberapa pengamat mendefinisikan sebagai teror hampir setiap tindakan kekerasan yang mengganggu, dan mengabaikan kekerasan oleh rezim yang sudah mapan; beberapa sarjana ingin agar psikopat dan penjahat diperiksa dan yang lain tidak; dan ada orang-orang yang, membela alasan yang disayangi, menyangkal bahwa patriot mereka adalah teroris (Bell, 2006).

Bell menambahkan bahwa bagian dari kesulitan dalam memahami terorisme ialah, karena sifat subjeknya yang pada dasarnya sulit dipahami. Selain itu, menurutnya, terorisme juga merupakan istilah revolusioner konvensional pada abad ke-19, dan kata itu sekarang merupakan label yang digunakan oleh orang yang terancam untuk merusak lawan-lawan mereka (Bell, 2006). Terorisme dengan demikian telah menjadi sarana yang mudah untuk mengidentifikasi ancaman jahat daripada mendefinisikan jenis kekerasan revolusioner khusus yang berkembang dari radikalisme Rusia dan anarkisme Eropa (dan AS) (Bell, 2006).

Dari fakta-fakta inilah istilah terorisme terlihat semakin kabur untuk dipatenkan, karena istilah tersebut mempunyai banyak makna—dan juga kepentingan. Fenomena ini yang kemudian juga direspon oleh dua orang filsuf terkemuka, yaitu Jurgen Habermas dan Jacques Derrida, dan keduanya bersepakat bahwa terorisme merupakan sebuah konsep yang sulit ditangkap (Borradori, 2005; Hendropriyono, 2009, p. 32).

Kesulitan tersebut bukan semata-mata karena alasan fenomena terorisme yang cukup kompleks, namun lebih pada bagaimana terorisme sebagai sebuah realitas kemudian bisa dieksplorasi dalam bahasa-bahasa atau wacana yang adil dan bebas dari kepentingan. Untuk membentuk dua kategori bahasa atau wacana tersebut merupakan suatu kesulitan tersendiri yang harus dipecahkan, karena baik bahasa ataupun wacana basis konstruksinya tidak bisa lepas dari pengaruh ruang dan waktu dari agen yang menggunakannya.

Selain itu, faktor yang sangat mungkin akan mempengaruhi dalam proses produksi wacana ialah adanya relasi dan dominasi kuasa, atau yang disebut oleh Bourdieu sebagai 'kekuatan dunia' (Bourdieu, 1987). Hal ini yang juga terjadi dalam proses produksi wacana terorisme, tidak terkecuali di negara-negara Barat. Fakta ini turut menyumbang kaburnya ketidakadilan dalam produksi wacana terorisme dan kebijakan politik yang menjadi produk turunannya.

Karena itu, secara spesifik penelitian ini akan meneliti bagaimana Barat khususnya AS menciptakan dan menggunakan narasi terorisme dalam konteks politik Timur Tengah? Bagaimana dominasi kuasa AS mengonstruksi realitas dengan menggunakan bahasa-bahasa simbolik yang hegemonik dan *stereotype* sehingga mengaburkan antara sosok pelaku dan korban dalam aksi terorisme?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi terorisme dan kebijakan kontra-terorisme Barat khususnya AS dalam konteks Timur Tengah. Signifikansi dari penelitian ini ialah untuk menambah wawasan keilmuan tentang isu terorisme dan dinamikanya dalam konteks implementasi. Dari penelitian ini ditemukan adanya ketidakadilan Barat khususnya AS dalam menggunakan narasi terorisme. AS juga menggunakan cara kekerasan untuk melakukan *counter-terrorism*, yang hal itu hanya melahirkan teroris-teroris baru bermunculan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena dan wacana terorisme yang berkembang di Timur Tengah. Penelitian ini menggunakan studi Pustaka dengan melakukan analisis data-data yang bersumber dari berbagai literatur rujukan, yaitu buku-buku, jurnal penelitian, dan *news* dari berbagai media mainstream yang kredibel.

Secara umum, diskursus tentang isu terorisme sudah banyak diteliti dengan berbagai sudut pandang yang digunakan oleh para peneliti. Di antara hasil penelitian tersebut, misalnya penelitian yang berjudul *Terrorism and Genocide* (B. Campbell, 2015). Dalam penelitian ini Brandly mengulas tentang pengaruh dominasi kuasa dalam mendefinisikan terorisme dan genosida, persamaan dan perbedaan antara dua term tersebut. Selanjutnya penelitian yang berjudul *Terorisme Kontemporer Dunia Islam* (Huda, 2014), yang membahas tentang relasi antara Barat-Islam. Menurutnya Barat merasa paling pantas untuk mendefinisikan terorisme, termasuk difenisi yang secara sepihak mengarah pada Gerakan-gerakan perlawanan Islam. Selain itu, literatur penting yang menjadi

basis penelitian ini yang membahas tentang sejarah awal munculnya terorisme ialah buku yang berjudul *Menguak Tabir Terorisme Internasional* (Chomsky, 1991a).

Dalam berbagai aspek penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih jauh menggali bagaimana ketidakadilan *labeling* terorisme Barat terhadap lawan politiknya dari aspek historitas dan genealoginya. Dan, bagaimana kemudian *labeling* itu menjadi narasi umum dan mengonstruksi realitas publik tentang habitus terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori strukturalisme genetik Pierre Bourdieu. Bourdieu mengenalkan konsep habitus yang merupakan objek kajian dalam menginterpretasi realitas yang dinarasikan secara berulang dan seakan menjadi kebenaran. Teori ini relevan untuk menganalisis metarasi terorisme yang dikonstruksi dan digunakan Barat untuk melabeli negara atau kelompok gerakan politik yang berseberangan dengan Barat. Habitus terorisme muncul dan menjadi narasi dominan karena didukung oleh modal dan arena yang dimiliki oleh Barat. Dengan modal yang memadai habitus terorisme mudah diterima dan dipercaya masyarakat, sehingga betapapun tidakadil *labeling* terorisme itu digunakan Barat seakan menjadi kebenaran yang final.

Hasil dan Pembahasan

Terorisme Dalam Demonologi AS

Terorisme bukanlah fenomena baru yang muncul dalam ruang publik masyarakat dunia, tetapi merupakan fenomena klasik yang sudah eksis sejak kurun waktu yang cukup lama. Dan, terorisme merupakan sebuah realitas objektif dalam sejarah manusia, yang kemudian didefinisikan dalam bahasa atau wacana yang (kadang) fiktif dan tidak independent. Bahasa atau wacana yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah peristiwa kekerasan sebagai tindakan terorisme, senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, tidak ada definisi yang baku bagi terorisme itu karena selalu lebur oleh perubahan waktu dan keadaan (Hendropriyono, 2009, p. 32).

Perubahan itu dapat ditelusuri dalam beberapa literatur yang membahas tentang persoalan tersebut. Misalnya, Noam Chomsky menjelaskan, bahwa istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat (Chomsky, 1991b, p. 19). Pemerintah yang dimaksud Chomsky ialah merujuk pada pemerintahan teror yang diterapkan oleh rezim Jacobin di Prancis (Primoratz, 2004). Selain di Prancis, di Rusia selama abad ke-19, partai yang berkuasa juga menggunakan kata 'teroris' untuk menggambarkan kaum revolusioner Rusia yang mengejar tujuannya melalui metode kekerasan (Tsui, 2014; Wilkinson, 2012). Namun, ketika istilah terorisme menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa di luar Rusia, dan bahkan ke India, konsepsi terorisme bergeser lagi (Tsui, 2014; Wilkinson, 2012, p. 13).

Selanjutnya, Pada 1940-an dan 1950-an, istilah terorisme lebih sering digunakan untuk menggambarkan kekerasan politik yang dilakukan oleh kaum nasionalis dan anti-penjajah di Afrika, Asia, dan Timur Tengah (Booth & Dunne, 2012; Tsui, 2014). Dalam konteks ini, dapat ditangkap arah kebijakan dan penamaan terorisme berubah secara signifikan dari fenomena terorisme di abad-18 yang sebelumnya digambarkan oleh Chomsky. Perubahan ini cukup kental dengan muatan politik dan kepentingan untuk menguasai. Dalam struktur kolonialisme dapat dengan mudah ditangkap siapa yang mempunyai kepentingan dalam mengontrol dan menggunakan term terorisme sebagai 'benteng' terakhir untuk bertahan dan menyerang.

Dalam konteks AS, menurut Collins, pada tahun 1965 kata 'terorisme' belum umum digunakan di Amerika Serikat (Tsui, 2015). Namun, tidak lama setelah itu istilah terorisme mulai jamak dikenal oleh rakyat AS, dan menurut Collins, elit politik AS secara teratur menyebut terorisme sebagai ancaman bagi AS (Tsui, 2015). Penggunaan istilah terorisme ini mulai sering digunakan ketika terjadi konflik antara AS dengan Vietnam. Istilah tersebut menjadi salah satu alat politik untuk mengintervensi Vietnam dan juga membungkam rakyat AS

sendiri—khususnya para pelajar, yang tidak bersepakat dengan tindakan AS terhadap Vietnam.

Menurut Winkler, sejak pemerintahan Kennedy pemerintah AS secara teratur menggunakan istilah-istilah seperti 'terorisme' dan 'teroris' untuk melabeli lawan-lawannya di luar negeri, dan para pembangkang politik internalnya, khususnya para pelajar yang mengadopsi taktik konfrontatif untuk memprotes intervensi AS di Vietnam Selatan (Carol K., 2006; Tsui, 2015). Dari sinilah, istilah terorisme atau teroris menjadi semacam demonologi² yang diabstraksikan dengan bahasa atau kosakata simbolik yang bertendensi stereotip. Hal ini bisa ditelisik dari bahasa dan metafora politik yang digunakan oleh para elit politik dan pemimpin AS.

Tokoh-tokoh penting AS mempunyai kosakata dan metafora politik tersendiri untuk mendefinisikan terorisme dan juga hal-hal yang diidentikkan dengan terorisme. Misalnya, Presiden Kennedy menggunakan frase 'Teror Komunis', yang menggabungkan ideologi politik komunisme dan terorisme, dalam suratnya kepada Presiden Diem Vietnam Selatan (Carol K., 2006, p. 18). Selain itu, ketika mengenang tentang Perang Dunia Kedua, Kennedy menciptakan frasa lain - 'teroris Nazi' - untuk menggambarkan Nazi Jerman (Chomsky, 1991b, p. 157). Dengan menggabungkan terorisme dan komunisme ke dalam frase pendamping, pemerintah Kennedy secara retorik menggabungkan taktik terorisme dengan tujuan ideologis kekuatan Komunis, dan dengan melakukan itu, membantu membenarkan intervensi militer AS di Vietnam Selatan (Tsui, 2015).

Pemerintahan Nixon tidak jauh berbeda dengan Kennedy dalam mengartikulasikan kasus terorisme. Bagi Nixon, terorisme menyiratkan ancaman eksternal dan internal terhadap Amerika Serikat; yaitu, terorisme dapat merujuk pada musuh-musuh Komunis di Vietnam dan kepada siswa yang memprotes

² Dari kata *demon* (hantu, memedi, lembut). Demonologi, dengan demikian, bermakna "perekayasa sistematis untuk menempatkan sesuatu agar ia dipandang sebagai ancaman yang sangat menakutkan. Lihat., (Chomsky, 1991, pp. 157)

kebijakan luar negeri AS-Vietnam (Carol K., 2006, p. 21). Selain itu, Presiden Carter juga mempunyai bahasa metafor sendiri dalam menerjemahkan aksi-aksi terorisme. Carter menggunakan retorika 'kejahatan' untuk menggambarkan sebuah aksi terorisme, khususnya dalam merespon krisis penyanderaan yang dilakukan oleh Iran terhadap para konsulat AS pada tahun 1970-an. Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, Carter menegaskan bahwa Iran saat ini terlibat dalam tindak pidana, tindakan teroris. Dan itu bukan masalah negosiasi pada dasar diplomatik antara dua negara. Ini masalah mengutuk Iran untuk terorisme internasional dan penculikan (Tsui, 2015).

Memasuki tahun 1980-an konstruksi wacana terorisme di AS mulai berubah, dan perubahannya cukup kentara dan signifikan. Perubahan tersebut bisa dilihat dari metafora yang digunakan oleh Presiden Reagan dalam merespon terorisme. Sepanjang tahun itu pemerintahan Reagan secara luas menggunakan metafora 'perang' untuk membangun wacana terorisme, terutama berfokus pada ancaman terorisme internasional dan apa yang disebut terorisme yang disponsori negara (Winkler, 2007). Perubahan tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya konfrontasi antara AS dan Uni Soviet yang terjadi waktu itu.

Reagan menggabungkan ilustrasi yang tergambar dalam peristiwa Perang Dingin dengan narasi 'perang' yang dia konstruksi sebagai basis dalam membentuk wacana baru, yaitu 'perang melawan terorisme'. Narasi perang yang dibangun oleh Reagan mengenai terorisme merupakan puncak dari kekhawatirannya atas ancaman terorisme. Oleh sebab itu, Reagan menegaskan bahwa 'terorisme adalah antitesa dari demokrasi' (Tsui, 2015). Atas dasar slogan yang dia ciptakan, AS di bawah kepemimpinan Reagan pernah melakukan serangan militer terhadap Libya. Serangan tersebut sebagai respon atas peristiwa pemboman klub malam La-Belle tahun 1986 di Berlin Barat, dan dalam peristiwa tersebut Libya dicurigai oleh Reagan sebagai dalangnya (Winkler, 2007).

Berdasarkan ilustrasinya terhadap peristiwa terorisme yang berlandaskan pada peristiwa Perang Dingin, wacana Reagan berfokus pada

peristiwa terorisme yang disponsori oleh Negara. Dan, wacana yang dibangun oleh Reagan tersebut tidak jauh berbeda dengan wacana terorisme yang dibangun oleh Clinton setelah itu. Clinton juga menggunakan metafora 'kejahatan' dan 'perang' dalam merespon aksi terorisme. Bahkan Clinton juga menyatakan 'perang melawan terorisme' – sebagaimana Reagan, setelah terjadi beberapa peristiwa terorisme selama dia memimpin. Namun, secara khusus Clinton merumuskan dan membangun wacana terorisme dengan menekankan karakteristik dari 'terorisme katastrofik', atau 'terorisme baru', yang karakteristiknya didasarkan pada target teroris, metode yang mereka adopsi dan senjata yang mereka gunakan (Tsui, 2015). Contoh terorisme baru yang dikemukakan oleh Clinton ialah adanya penggunaan senjata pemusnah massal/*weapons of mass destruction* (WMD) dan *cyber-terrorism*.

Pada pemerintahan selanjutnya, wacana 'terorisme baru' yang dikemukakan oleh Clinton juga diadopsi oleh Georg W. Bush. Bush menjadikan wacana Clinton tentang terorisme baru sebagai alasan penting untuk mengadopsi kembali wacana 'perang melawan terorisme' yang dikemukakan oleh Reagan. Hal itu terjadi setelah terjadinya peristiwa terorisme 11 September 2001, yang merupakan peristiwa paling memilukan dalam sejarah AS. Bush sepertinya tidak main-main dalam merespon peristiwa terorisme 9/11, karena setelah peristiwa tersebut Bush langsung menyerang Afghanistan dan Irak untuk memerangi al-Qaeda yang ditengarai sebagai dalang dari aksi terorisme tersebut. Atas nama kontraterorisme, pemerintahan George W. Bush berpendapat bahwa perang melawan Irak diperlukan dan merupakan bagian penting dari perang melawan teror (Tsui, 2014).

Setelah pemerintahan Bush berakhir, Presiden Obama, yang merupakan presiden berikutnya mulai menggeser bahasa yang digunakan oleh Bush. Presiden yang dikabarkan pernah hidup di Indonesia ini menggunakan bahasa ekstremisme untuk mengabstraksikan tindakan terorisme. Memasuki fase pemerintahan baru, Presiden Donald Trump menyajikan pergeseran diskursif dari bahasa yang digunakan oleh Obama. Trump menggunakan bahasa teror

jihad untuk mengidentikkan fenomena terorisme, Bahasa yang digunakan oleh Trump tersebut bisa dilihat dari rilis dokumen mengenai panduan strategis untuk pendekatan AS terhadap keamanan dan pertahanan nasional. Dalam dokument tersebut Trump menggunakan bahasa teroris-teroris jihad untuk mengilustrasikan para pelaku terorisme (Kaczmarek et al., 2018).

Dari fakta-fakta di atas, bahasa-bahasa simbolik atau berbagai bentuk metafora merupakan salah satu taktik penting para pemimpin AS dalam melakukan kontraterorisme. Cara-cara demikian terus diwarisi oleh para pemimpin AS selanjutnya. Membangun narasi simbolik melalui berbagai metafora dan penafsiran menjadi penting karena bisa mempengaruhi publik untuk mendukung AS dalam melawan aksi terorisme. Kasus ini bisa dilihat dalam peristiwa penyerangan AS terhadap Irak, di mana paska tragedi 9/11 AS melakukan penafsiran dan menerka Irak menggunakan senjata pemusnah massal. Cara tersebut berfungsi untuk membantu elit penguasa AS mendapat persetujuan dari publik AS secara khusus dan masyarakat dunia secara umum untuk melakukan serangan militer terhadap Irak.

Penggunaan metafora juga penting karena akan membantu menentukan cara-cara apa yang akan digunakan AS dalam menumpas para teroris. Hal ini ditegaskan oleh Fairclough (2001) dan berpendapat bahwa "metafora yang berbeda menyiratkan cara yang berbeda dalam menangani sesuatu" (Fairclough, 2001, p. 100; Tsui, 2014). Jadi, ketika AS menggambarkan terorisme sebagai sebuah kejahatan yang mengancam dan sebagai penyakit yang berbahaya, maka tidak ada cara lain selain memerangnya dan menghilangkannya. Faktanya memang demikian, AS tidak membuka negosiasi dalam melakukan kontraterorisme, dan satu-satunya cara yang diambil ialah dengan memerangnya karena terorisme dianggap sebagai 'ancaman' serius bagi AS.

Narasi 'ancaman' yang diidentikkan terhadap fenomena terorisme juga merupakan bahasa simbolik atau metafora yang diartikulasikan oleh para elit politik AS untuk melegalkan sikap yang akan diambil oleh mereka. Bahaya dan ancaman yang ditekankan oleh politisi sebenarnya bukanlah kondisi objektif;

sebaliknya, ia didefinisikan, diartikulasikan, dan dikonstruksi secara sosial oleh aktor yang berwenang (D. Campbell, 1998, pp. 1-2; Tsui, 2014). Bagaimana hal itu bisa dengan mudah dilakukan AS? Sebagai negara adikuasa, tentu tidak sulit bagi AS untuk melakukan hal itu karena AS mempunyai cukup modal, baik modal kapital, kekuasaan, kekuatan, pengetahuan, atau lainnya. Label negara 'super power' juga menjadi keuntungan sendiri bagi AS dan menjadi modal besar untuk mempengaruhi dan mengontrol semua kebijakan dan wacana yang berkembang di dunia internasional, tidak terkecuali wacana tentang terorisme.

Oleh sebab itu, suatu hal yang wajar ketika Bourdieu menyatakan, bahwa pemahaman tentang terorisme atau ancaman teroris sering didefinisikan dan diberi makna oleh elit politik yang kuat, atau 'kekuatan dunia' (Bourdieu, 1987). Dalam konteks dunia internasional, tentu kita bisa membaca siapa agen yang disebut Bourdieu sebagai 'kekuatan dunia.' Dan faktanya, dengan modal yang dimiliki AS selalu 'memantaskan diri' untuk menentukan dan mengubah alur wacana dan kebijakan yang akan diambil dalam merespon fenomena terorisme, tidak terkecuali ketika AS mengambil inisiatif aksi militer dan menutup pintu dialog dengan para teroris.

AS merasa pantas untuk mengambil kebijakan tersebut karena AS merasa mampu dan perlu untuk melakukannya. Hal itu ditegaskan oleh Albright dalam sebuah interview di NBC-TV pada 1998 dan menyatakan, "jika kita harus menggunakan kekuatan, itu karena kita adalah Amerika; kita adalah bangsa yang sangat diperlukan. Kami berdiri tegak dan kami melihat lebih jauh daripada negara lain di masa depan" (Tsui, 2014).

Dalam pernyataan tersebut Albright menegaskan bahwa AS merupakan negara kuat yang senantiasa diperlukan kekuatannya oleh dunia. Atas dasar alasan tersebut para elit politik dan penguasa AS menjadikan nama besar negaranya sebagai modal sekaligus tempat perjuangan untuk memperoleh monopoli dan dominasi kuasa. Upaya monopoli tersebut mereka praktikkan, salah satunya, melalui mekanisme-mekanisme budaya dengan menciptakan berbagai narasi bahasa simbolik, khususnya narasi bahasa dan metafora tentang

terorisme. Cara-cara demikian yang oleh Bourdieu disebut sebagai *kekerasan simbolik* (Ritzer, 2012, p. 908).

Kekerasan simbolik ini termanifestasi dalam konstruksi wacana terorisme yang kemudian menjelma menjadi wacana dominan di ruang publik masyarakat dunia. Wacana terorisme tidak lahir dari ruang hampa yang steril dari berbagai kepentingan. Dalam dunia politik, wacana ini lahir dari sebuah kalkulasi politik para elit, yang menggunakan kekuatan simbol sebagai alat untuk mengontrol realitas dan menciptakan arena yang pas untuk melakukan manuver politik. Dalam konteks AS, wacana simbolik ini menjadi dominan karena disangga oleh kekuatan ekonomi-politik yang dimiliki AS, yang mana hal itu berpengaruh besar dalam menjadikan wacana tersebut sebagai wacana arus utama yang mesti diterima oleh publik dunia.

Absurditas Narasi dan Kebijakan Counter-Terrorism AS

Terorisme merupakan istilah yang cukup kompleks dan problematik, khususnya dalam merumuskan definisinya. Hingga kini, belum ada istilah baku mengenai terorisme karena fenomena ini akan terus berubah seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Hal ini yang juga pernah ditegaskan oleh Jenkins, seraya mengatakan bahwa perjalanan terorisme selama beberapa dekade mendatang tidak dapat diprediksi, sama seperti evolusi terorisme yang sebenarnya selama 30 tahun terakhir mungkin tidak dapat diprediksi (Jenkins, 2006b). Kendati demikian kondisinya, ada banyak definisi yang muncul ke permukaan untuk mengistilahkan aksi kekerasan tersebut. Tentu istilah-istilah tersebut tidak bersifat final dan bebas dari kepentingan.

Apapun bentuknya, terorisme merupakan ancaman besar bagi setiap negara. Setiap negara mungkin menyadari fakta tersebut. AS, misalnya, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan terorisme. Bahkan, kontraterorisme menjadi salah satu agenda penting dan mendominasi agenda keamanan nasional AS. Michael Kaczmarek, dkk, anggota *European Parliamentary Research Service* (EPRS) dalam penelitiannya di AS menjelaskan, bahwa untuk meningkatkan intelijen

dan aparat keamanan tanah air negara itu, administrasi presiden George W. Bush dan Barack Obama menerapkan serangkaian reformasi legislatif, organisasi, kebijakan, dan personel. Pemerintahan baru di bawah Donald Trump melanjutkan upaya-upaya ini dan telah memberikan penekanan khusus pada pembatasan masuknya dan memperketat proses pemeriksaan untuk para pengungsi dan imigran (Kaczmarek et al., 2018).

AS mempunyai fokus sendiri dalam mengatasi ancaman terorisme. Saat ini, strategi kontraterorisme domestik AS berfokus pada ancaman teroris Islam radikal, menghentikan pergerakan pejuang teroris asing, dan melawan penyebaran radikalisme (Kaczmarek et al., 2018). Dalam penelitian tersebut Michael juga merilis tindakan prioritas yang diambil AS dalam menjalankan agenda kontraterorisme di bawah pemerintahan Trump. Sekretaris Keamanan Dalam Negeri AS, Kirstjen M. Nielsen menyatakan, pada Januari 2018, empat tindakan prioritas bagi administrasi Trump untuk memerangi terorisme. Pertama, menggagalkan plot teroris dan melawan ancaman yang muncul. Kedua, menghalangi teroris untuk mencapai Amerika Serikat, melalui pemeriksaan yang lebih ketat dan penyaringan yang lebih ketat. Ketiga, memerangi radikalisme dan rekrutmen teroris, dan, keempat, mengejar ancaman ke sumbernya (Kaczmarek et al., 2018).

Rumusan langkah kontraterorisme dalam administrasi Trump tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah yang telah dirumuskan oleh penguasa-penguasa sebelumnya, seperti Bush, misalnya. Namun, hasil yang terlihat tidak terlalu banyak perubahan. Selain itu, cara kekerasan juga masih tetap jadi pilihan presiden setelah Trump yaitu Joe Biden. Dalam melakukan kontraterorisme Biden hanya melakukan *rebranding* atas cara kerja pemimpin sebelumnya, yang diberi nama operasi "over-the-horizon" - sebuah ungkapan halus untuk serangan pesawat tak berawak dan serangan pasukan operasi khusus.

Hal pokok yang menjadi alasan, perang ini tidak akan berakhir dengan penyerangan formal; musuh terlalu menyebar untuk sekadar menyerang dan menaklukkan (Byman, 2007). Oleh sebab itu, harus ada opsi lain yang lebih *soft*

untuk bisa meredakan aktivitas terorisme yang dilakukan oleh para teroris. Mengambil langkah ofensif-militeristik tidak akan serta merta mematikan jaringan terorisme sampai pada sel-sel di lapis bawah. Hal ini yang penting dicermati oleh para perumus atau pengambil kebijakan.

Sebagian besar elemen strategi kontraterorisme membahas satu dari dua tujuan berbeda: mengganggu kelompok itu sendiri, dan operasinya; atau mengubah lingkungan keseluruhan untuk meredakan amarah kelompok atau membuatnya lebih sulit untuk mengumpulkan uang atau menarik calon anggota (Byman, 2007). Secara teori, setiap elemen dari strategi ini cukup baik, setidaknya untuk meminimalisir jumlah serangan yang dilakukan oleh para teroris. Sebagaimana dicontohkan Daniel, misalnya, AS dapat mendukung sekutu-sekutunya yang paling agresif dan cakap yang berkomitmen untuk menghentikan al-Qaeda, memberikan mereka dukungan finansial, bantuan intelijen, dan bantuan lainnya. Dalam jangka panjang, Washington dapat mencoba mengurangi keterasingan politik di dunia Muslim dengan menyebarkan demokrasi, untuk mengurangi tingkat keluhan rakyat yang menjadi sumber teror (Byman, 2007).

Namun, sejauh ini AS tidak cukup berhasil menjalankan strategi tersebut, dan nyatanya strategi tersebut kurang efektif, bahkan cenderung kontra-produktif. Kenapa demikian? Di satu sisi, AS sering mendemonstrasikan identitasnya sebagai negara yang demokratis, tapi di sisi lain AS mendukung dan menggandeng para penguasa otoriter dan diktator untuk melawan terorisme di kawasan Timur Tengah, seperti Hosni Mubarak di Mesir, misalnya. Mesir merupakan salah satu sekutu terdekat Amerika dalam perang melawan terorisme dan secara agresif mengejar al-Qaeda dan afiliasinya, baik untuk kepentingannya sendiri maupun atas nama Washington (Byman, 2007). Pada saat yang sama, Presiden Mesir Hosni Mubarak adalah diktator pemberontakan, korupsi, stagnasi dan penindasannya mengasingkan dan membuat marah banyak orang Mesir dan menyebabkan beberapa kekerasan (Abdo, 2000, 2004; Byman, 2007).

Tidak hanya mendukung Mubarak, AS juga menyokong para penguasa diktator lainnya di Timur Tengah seperti Shah Fahlevi di Iran, Ben Ali di Tunisia, dan Attaturk di Turki. Para penguasa otoriter tersebut disokong karena sudi “menggelar karpet merah” bagi AS untuk mengeksplorasi minyak di tanah Arab tersebut. Hal itu berbeda dengan nasib Qadhafi di Libya yang harus lengser setelah digempur tantara AS. Sikap Qadhafi yang pantang tunduk pada AS menyebabkan negara yang sebelumnya termakmur di Afrika tersebut hancur dan “dipaksa” menjadi negara miskin. Dan, lagi-lagi AS membawa bingkisan demokrasi sebagai alat untuk meneror dan menghancurkan Libya.

Faktor Sebab-Akibat

Penggunaan cara-cara kekerasan, penindasan, dan semacamnya akan sulit untuk meredam aksi terorisme. Karena pada dasarnya terorisme muncul, salah satunya, atas dasar represi dan ketertindasan itu sendiri. Represi AS dilakukan melalui mekanisme ‘permainan bahasa’ yang hegemonik dan sarat *stereotype* untuk ‘mewajarkan’ tindakan yang perlu diambil (Mas’odi, 2022). Hal itu yang selama ini belum sepenuhnya dirubah oleh AS. Yang terjadi malah sebaliknya, AS sering ikut serta dalam menciptakan kekerasan dan penindasan. Misalnya, ketika peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi terhadap bus Sekolah di Yaman. Dalam peristiwa tersebut setidaknya ada 29 anak-anak yang tewas dan 30 anak lainnya mengalami luka-luka. Bom yang digunakan dalam insiden tersebut ditengarai buatan AS, yaitu bom MK 82 yang dipandu laser, seberat 500 pon atau 227 kilogram buatan Lockheed Martin, salah satu kontraktor pertahanan utama AS (Abdo, 2000, 2004; Byman, 2007).

Sebagaimana yang diketahui, sejak pertengahan 2015 AS dan negara koalisi Arab Saudi telah lama berkonflik dengan kelompok Ansarullah-Houthi di Yaman. AS dan negara koalisi Arab Saudi secara berkala melakukan serangkaian serangan di kawasan Yaman dan menyebabkan banyak korban nyawa berjatuhan. Serangan tersebut secara tidak langsung menodai wajah AS yang mengusung wacana demokrasi. Dari situ terlihat, demokrasi versi AS ialah demokrasi bagi bangsa dan sekutu politik AS sendiri. Di luar itu, prinsip

demokrasi tidak pernah dibagi dan diterapkan AS, khususnya bagi lawan politiknya di kawasan Timur Tengah.

Persoalan ini sudah lama terjadi dan tidak pernah terselesaikan di kawasan ladang minyak tersebut. Tak pelak, persoalan kekerasan dan ketidakadilan juga menjadi dua masalah besar yang terus disoroti oleh kelompok terorisme. Al-Qaeda, misalnya, menyoroti ketidakadilan AS dalam merespon siapa yang seharusnya diterka sebagai teroris atau bukan. Osama bin Laden, mantan pemimpin al-Qaeda pernah mengkritik dan mempersoalkan sikap warga AS yang tidak adil dalam merespon tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahnya terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dalam kritiknya, Osama melontarkan pernyataannya sebagai berikut:

...rakyat Amerika dulu bangkit menentang pemerintahnya dalam perang melawan Vietnam. Mereka harus melakukan hal yang sama sekarang ini. Rakyat Amerika harus menghentikan pembunuhan... yang dilakukan pemerintah mereka (Berner, 2007, p. 26; Hendropriyono, 2009, pp. 35-36).

Dari pernyataan di atas, Osama menuntut rakyat AS adil dalam merespon kekerasan politik yang dilakukan oleh pemerintahnya, sebagaimana yang pernah dilakukan rakyat AS pada masa perang dengan Vietnam. Tuntutan Osama tidak hanya pada rakyat tetapi juga kepada para elit politik AS. Osama menuntut adanya kesetaraan dan keadilan secara menyeluruh dalam berbagai aspek, khususnya dalam merespon peristiwa kekerasan. Retorika Osama bin Laden secara konsisten menyuarakan keinginan untuk kesetaraan global, dalam hal ini, antara Muslim dan Kristen, atau antara dunia Islam dan Barat (Devji, 2009). Bagi Osama, tidak boleh ada salah satu pihak yang diistimewakan, semua lapisan manusia harus sama-sama merasakan keamanan dan ketentraman hidup secara merata, atau tidak sama sekali.

Osama bin Laden tidak melakukan apa pun selain mengakui kesatuan sebuah bola dunia di mana tidak ada manusia yang dapat dipisahkan dari yang lain: masing-masing harus bertanggung jawab atas rekan-rekannya, dengan penderitaan yang harus ia identifikasi (Devji, 2009). Logika Osama ini dibangun berdasarkan perinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab

semua lapisan. Namun nyatanya, apa yang menjadi tuntutan Osama tidak didapatkan sama sekali dari Barat, khususnya AS. AS kerap kali tidak memenuhi tuntutan keamanan yang seharusnya dirasakan oleh semua manusia, tidak terkecuali manusia-manusia yang hidup di kawasan Timur Tengah yang berbeda pilihan politik dengan AS. Serangan-serangan militeristik yang dilakukan oleh AS dan Barat secara umum merupakan sebuah bentuk ketidakadilan, dan pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi dan terus menerus dilakukan Barat di kawasan Timur Tengah.

Merespon aktivitas militeristik Barat di kawasan Timur Tengah, al-Qaeda mengambil inisiatif jihad untuk menuntut apa yang sudah direnggut oleh Barat, yaitu keadilan, keamanan dan kemanusiaan. Sebagaimana disampaikan Devji bahwa bagi kelompok al-Qaeda ideologi jihad merupakan ideologi “kamanusiaan” (Creswell, 2008). Oleh sebab itu, atas nama membela kemanusiaan, al-Qaeda menghalalkan kekerasan dengan cara berjihad untuk menuntut keadilan dari Barat. Apa yang dilakukan oleh al-Qaeda merupakan respon nyata dari apa yang dilakukan oleh Barat, terlebih AS. Retorika al-Qaeda, dan praktiknya, selalu diambil dari dunia musuh-musuhnya (Devji, 2014). Oleh sebab itu, ketika AS menggunakan kekerasan, maka al-Qaeda juga melakukan hal yang sama untuk menuntut keadilan.

Osama meyakini, bahwa keadilan tersebut akan didapatkan dari Barat hanya dengan satu cara, yaitu kematian. Hanya kematian yang bisa menciptakan persamaan antar manusia (Devji, 2009). Logika inilah yang menyebabkan Osama terus menekankan perlunya kesetaraan teror antara dunia Muslim dan AS. Osama tidak mau membiarkan AS secara berulang menciptakan kekacauan di dunia Muslim, dan oleh karenanya al-Qaeda harus melakukan hal yang sama terhadap AS. Bagi al-Qaeda, teror adalah satu-satunya bentuk di mana kebebasan dan kesetaraan global sekarang tersedia (Devji, 2009).

Logika terorisme ala Osama bin Laden dan al-Qaeda memang agak unik. Tapi dari sini kita bisa menilai bahwa opsi kekerasan atau cara-cara militer dalam

melakukan kontraterorisme tidak serta-merta akan menyelesaikan persoalan. Kemungkinan besar – sebagaimana yang digambarkan Devji mengenai al-Qaeda, opsi militeristik hanya akan melahirkan teroris-teroris baru terus bermunculan. Pencegahan terorisme tersebut hanya akan bermuara pada peristiwa kekerasan yang terus berulang.

Yang perlu dipahami bahwa para teroris sudah terbiasa dengan perang dan kekerasan, sehingga mereka tidak akan sertamerta mengkhiri aksinya hanya dengan gertakan aksi militer. Sebagaimana ditegaskan Jenkins, bahwa tidak ada teroris yang akan menyerah di geladak kapal perang (Jenkins, 2001). Oleh sebab itu, selama AS menerapkan cara-cara kekerasan dan enggan membuka dialog dalam melakukan kontraterorisme, maka kemungkinan kebijakan tersebut menjadi absurd belaka, jauh dari ekspektasi.

Lantas apa langkah konkrit untuk meredam aksi terorisme? Kiranya solusi yang tepat untuk meredakan aktivitas terorisme, sebagaimana yang disampaikan Jenkins di bawah ini, yaitu:

Pertahanan kita yang paling efektif terhadap terorisme tidak akan datang dari pengawasan, penghalang konkret, detektor logam, atau undang-undang baru, tetapi dari kebajikan kita sendiri, keberanian, pengabdian yang ber kelanjutan terhadap cita-cita kita tentang masyarakat bebas, realisme dalam penerimaan risiko, ketabahan, kecerdasan dan skeptisisme yang menyertainya, penghindaran ekstremisme, dan kemanusiaan serta rasa kebersamaan yang terlalu cepat terungkap ketika kita meratapi orang mati. Itu akan datang dari patriotisme sejati (Jenkins, 2001).

Solusi yang ditawarkan Jenkins di atas memuat prinsip dasar kemanusiaan, yang hal itu merupakan amanat dari sistem demokrasi. AS sebagai kampium demokrasi seharusnya konsisten dan berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan semua lapisan masyarakat dunia. Tidak tebang pilih dalam menerapkan kebijakan politik dan hukum, khususnya dalam kasus terorisme di berbagai belahan dunia.

Penutup

Dalam beberapa dekade terakhir konflik Timur Tengah menjadi salah satu medan penting lahirnya diskursus isu terorisme. Diskursus tersebut tidak jarang mengaburkan kebenaran antara mana pihak pelaku dan korban terorisme. Dalam konteks ini Barat khususnya AS dengan modal *power* yang dimiliki sering mendominasi wacana di ruang publik dan membangun stigmatisasi yang timpang, sehingga pelaku terorisme tidak jarang hanya disematkan pada pihak yang berseberangan dengan AS.

Sejak peristiwa “selasa kelam” tahun 2001 silam, pensinoniman Islam dengan terorisme oleh AS seakan-akan benar dan mewajarkan setiap opsi militer sebagai *counter-terrorism*. Cara-cara kekerasan yang digunakan AS hanya melahirkan aksi kekerasan baru dari pihak korban. Semakin lama kekerasan dan penindasan dilakukan oleh AS untuk meredam aksi terorisme, maka teroris-teroris baru akan terus bermunculan. Hal itu terjadi karena terorisme muncul, salah satunya, atas dasar kehidupan mereka yang terancam dan rasa ketertindasan itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdo, G. (2000). *No God but God: Egypt and the Triumph of Islam*. Oxford University Press.
- Abdo, G. (2004). *Islamism in North Africa II: Egypt's Opportunity*. ICG.
- Bell, J. B. (2006). Trends on Terror: The Analysis of Political Violence. *World Politics*, 29(03), 476–488. <https://doi.org/10.2307/2010007>
- Berner, B. K. (2007). *The World According to Al Qaeda*. Peacock Books.
- Booth, K., & Dunne, T. (2012). *Terror in Our Time*. Routledge.
- Borradori, G. (2005). *Filsafat dalam Masa Teror, Dialog dengan Jurgen Habermas dan Jacques Derrida* (A. Taryadi, Trans.). Penerbit buku Kompas.
- Bourdieu, P. (1987). What Makes a Social Class? On The Theoretical and Practical Existence Of Groups. *Journal of Sociology*, 32, 1–17.
- Byman, D. (2007). US Counter-terrorism Options: A Taxonomy. *Survival*, 49(3), 121–150. <https://doi.org/10.1080/00396330701564711>
- Campbell, B. (2015). Terrorism and Genocide. *Sociology of Crime, Law and Deviance*, 20, 47–65. <http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/S1521-613620150000020003>
- Campbell, D. (1998). *Writing Scurity*. Manchester University Press.
- Carol K., W. (2006). *In The Name of Terrorism: Presidents on Political Violence in the Post-World War II Era*. State University of New York Press.
- Chomsky, N. (1991a). *Menguak Tabir Terorisme Internasional* (H. Basyaib, Trans.). Penerbit Mizan.
- Chomsky, N. (1991b). *Menguak Tabir Terorisme Internasional* (H. Basyaib, Trans.). Penerbit Mizan.
- Creswell, R. (2008, December 26). Oh the humanity. *The National*.
- Devji, F. (2009). The Terrorist as Humanitarian. *Berghahn Journals*, 53(1), 173–192. <https://doi.org/10.3167/sa.2009.530111>
- Devji, F. (2014). Politics after Al-Qaeda. *Philosophy and Social Criticism*, 40(4–5), 431–438. <https://doi.org/10.1177/0191453714525391>
- Fairclough, N. (2001). *Language and Power*. Pearson Education.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*. PT Kompas Media Nusantara.

- Huda, S. (2014). Terorisme Kontemporer Dunia Islam. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 429–450.
- Jenkins, B. M. (1974). *International Terrorism: A New Kind of War-fare*. Rand Corporation, Santa Monica.
- Jenkins, B. M. (1999). “Internasional Terrorism” in *The Use of Force* (R. Art & K. N. Waltz, Eds.; 5th ed.). Rowman & Littlefield, Lanham.
- Jenkins, B. M. (2001). Terrorism and Beyond: A 21st Century Perspective. *Studies in Conflict and Terrorism*, 24(5), 321–327.
<https://doi.org/10.1080/105761001750434196>
- Jenkins, B. M. (2006a). *Irish Natinalism And the British State: From Repeal to Revolutionary Nationalism*. McGill-Queen’s Uiniversity Press.
- Jenkins, B. M. (2006b). The New Age of Terrorism. In *The McGraw-Hill Homeland Security Handbook: The Definitive Guide for Law Enforcement, EMT, and all other Security Professionals*. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2003.11.001>
- Johnson, P. (2008). *Heroes: From Alexander the Great and Julius Caesar to Churchill and de Gaulle (P.S.)*.
- Kaczmarek, M., Lazarou, E., Guevara, M., & Fogel, B. (2018). US counter-terrorism since 9 / 11 Trends under the Trump administration. *European Parliamentary Research Service*.
- Mas’odi, (2022). White Supremacy, Kekerasan Wacana, dan Ketidakadilan: Analisis Politik Standar Ganda Dunia Barat Dalam Konflik di Palestina dan Ukraina. *AL-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 5(2):177-194.
DOI:[10.36835/alirfan.v5i2.5892](https://doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5892)
- Prasetyo, E. (2002). *Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan*. Pustaka Pelajar.
- Primoratz, I. (2004). State terrorism and counter-terrorism. In *Terrorism: The Philosophical Issues*. <https://doi.org/10.1057/9780230204546>
- Ritzer, G. (2012). *Toeri Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (S. Pasaribu, Rh. Widada, & A. Adinugraha, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Sihbudi, R. (2007). *Menyandera Timur Tengah*. Penerbit Mizan.

- Tsui, C. K. (2014). *Tracing the Discursive Origins of the War on Terror : President Clinton and the Construction of New Terrorism in the Post-Cold War Era* (Issue April). University of Otago.
- Tsui, C. K. (2015). Framing the threat of catastrophic terrorism: Genealogy, discourse and President Clinton's counterterrorism approach. *International Politics*, 52(1), 66–88. <https://doi.org/10.1057/ip.2014.36>
- Whittaker, D. (2003). *The Terrorism Reader*.
- Wilkinson, P. (2012). *Is Terrorism Still a Useful Analytical Term or Should It Be Abandoned?* Routledge.
- Winkler, Carol. (2007). Parallels in Preemptive War Rhetoric: Reagan on Libya; Bush 43 on Iraq. *Rhetoric & Public Affairs*, 10(2), 303–334. <https://doi.org/10.1353/rap.2007.0042>